

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2019, perekonomian Indonesia berhasil meningkat di tengah perlambatan ekonomi global yang dipengaruhi oleh dinamika persaingan dagang dan geopolitik, penurunan harga produk, serta lemahnya ekonomi di banyak negara.

Meskipun Indonesia mengalami situasi eksternal tersebut, perekonomian tahun 2019 tetap dapat tumbuh di atas 5% karena terjaganya permintaan, konsumsi pemerintah, dan investasi. Kinerja perekonomian dan pelaksanaan program pembangunan telah berhasil menurunkan tingkat pengangguran, mengurangi kesenjangan dan menstabilkan kesejahteraan masyarakat.

Di tengah situasi ekonomi global yang tidak pasti di banyak negara, APBN tahun 2019 secara terbuka kuantitas ekonomi untuk menjalankan strategis dan menjaga kestabilan makroekonomi, mempertahankan pertumbuhan ekonomi domestik, dan mendorong laju kegiatan dunia usaha, dan tetap memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Biaya utang yang diakibatkan oleh adanya utang, menjadikan laba berkurang. Akibat adanya utang yang terlalu tinggi dan tidak ditangani dengan tepat di suatu perusahaan, maka hal ini dapat menimbulkan risiko. Dalam menentukan bunga pinjaman, kreditur menilai tingkat risiko dari suatu perusahaan. Bila semakin tinggi risiko yang dialami perusahaan,

ke kreditur akan menetapkan bunga pinjaman yang tinggi. Hal ini dilakukan kreditur untuk mengantisipasi risiko perusahaan apabila tidak mampu membayar utangnya atau dikenal dengan istilah *default risk* (Wardani & Rumahorbo, 2018).

Utang perbankan milik pemerintah atau bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ternyata diketahui sangat besar. Utang yang menggunung hingga triliunan itu akan mengancam krisis ekonomi. Total utang perbankan BUMN itu ikut serta total utang BUMN yang mencapai Rp 5.271 triliun (www.dpr.go.id, 17 Juli 2022).

Data per 31 Desember 2018, BRI merilis laporan keuangannya yang menyatakan jumlah utang sebesar Rp 1.111 triliun dengan total simpanan nasabah Rp 944 triliun. Sementara itu, total aset mencapai Rp 1,296 triliun dan ekuitas sebesar Rp 185 triliun. Demikian diungkapkan Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan dalam rilisnya, Jumat (22/11/2019) (www.dpr.go.id, 17 Juli 2022).

Bank Mandiri juga merilis laporan keuangan per 31 Desember 2018 dengan jumlah utang Rp 941 triliun. Total simpanan nasabah Rp 766 triliun, total aset Rp 1.202 triliun, dan ekuitas sebesar Rp 184 triliun. Lain lagi dengan BNI yang per 31 Desember 2018 menyatakan utangnya Rp 671 triliun dan total simpanan nasabah Rp 552 triliun. Sementara asetnya mencapai Rp 808 triliun dengan ekuitas sebesar Rp 110 triliun (www.dpr.go.id, 17 Juli 2022).

PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) menyatakan kesiapannya membayar utang obligasi sebesar Rp 1,1 triliun, yang jatuh tempo pada 30 September 2021 ini. Hal tersebut berdasarkan informasinya kepada PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (21/09/2021). Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2016 seri A, dengan nilai pokok obligasi sebesar Rp 1,1 triliun. Tenor bond ini adalah lima tahun (m.liputan6.com, 17 Juli 2022).

PT Bank OCBC NISP telah menyiapkan dana untuk membayar surat utang yang akan jatuh tempo pada Selasa (6/7). Berdasarkan peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) Nomor 1.A.3 tentang Kewajiban Pelaporan Emiten, PT OCBC NISP menyiapkan dana untuk pelunasan berkelanjutan III Bank OCBC NISP Tahap 1 Tahun 2018 Seri C sebesar Rp342 miliar yang jatuh tempo 6 Juli 2021. Surat Utang ini telah diterbitkan Bank OCBC NISP sejak 6 Juli 2018. Berdasarkan data Pefindo, surat utang ini memiliki bunga 7,75% bertenor 3 tahun (vibiznews.com., 30 Juli 2021).

Perusahaan meminta bantuan pinjaman dana dari kreditur untuk perkembangan perusahaan. Dalam memberikan biaya dan memastikan jumlah pengembalian atas biaya yang dibagikan untuk perusahaan, kreditur akan menilai faktor yang harus dipenuhi perusahaan (biaya utang).

Hasil Dian Arista Amalia & Norman Duma Sitinjak, (2020), Assyifayufi Khoirul Nisa & Assyifayufi Wulandari, (2021), dan Aditya Erlangga Sulisty, (2018) menyatakan bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap biaya utang. Namun berbeda dengan hasil penelitian dari Fahreza Utama, Dwi Jaya Kirana, dan Kornel

Sitanggang, (2019) yang menjelaskan penghindaran pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap biaya utang. Dewi Kusuma Wardani & Rumahorbo, (2018) menyatakan penghindaran pajak mempunyai pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap biaya utang. Sedangkan penelitian Elvis Nopriyanti Sherly & Desi Fitria, (2019) mengatakan bahwa penghindaran pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap biaya utang.

Penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Samhudi, (2016), Dewi Kusuma Wardani dan Hestina Dwi Sari Rumahorbo (2018), Muhamad Septian & Rosinta Ria Panggabean, 2015) mengatakan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap biaya utang. Sedangkan berbeda dengan hasil penelitian dari (Calen, 2019), Dwi E. Natalia, Tri H. Utamingtyas, Diena Noviarini, (2021) yang mengatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap biaya utang. Rudi Harianto dan Nurul Aini (2020) menyatakan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap biaya utang.

Penelitian Dewi Kusuma Wardani dan Hestina Dwi Sari Rumahorbo (2018) menjelaskan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap biaya utang. Sedangkan penelitian Akhmad Samhudi (2016) menjelaskan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap biaya utang. Dan penelitian yang dilakukan oleh

Calen (2019) mengatakan kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap biaya utang.

Penelitian dari Dian Arista Amalia, Norman Duma Sitinjak (2020) mengatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap biaya utang. Namun lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Samhudi (2016), Aditya Erlangga Sulisty (2018), Calen (2019) menjelaskan kepemilikan institusional berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *cost of debt*.

Dian Arista Amalia, Norman Duma Sitinjak (2020) yang mengatakan komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap biaya utang. Sedangkan penelitian Dewi Kusuma Wardani dan Hestina Dwi Sari Rumahorbo (2018), Calen (2019) menjelaskan komite audit berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap biaya utang.

Berdasarkan latar belakang di atas, variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel penghindaran pajak dan *Good Corporate Governance*. Untuk mengukur *Good Corporate Governance* terdapat beberapa variabel, diantaranya proporsi komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komite audit.

Biaya utang dapat dipengaruhi oleh beberapa variabel diantaranya penghindaran pajak dan *good corporate governance*. Variabel pertama yaitu penghindaran pajak penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya untuk memperkecil pajak yang diperbolehkan menurut undang-undang. Upaya menghindari pajak dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan

undang-undang perpajakan serta tidak melanggarnya. Semakin pajak dihindari maka tinggi pula biaya bunga yang dikeluarkan perusahaan, oleh sebab itu dapat meningkatkan biaya hutang (Azizah, 2016).

Selain penghindaran pajak, *Good Corporate Governance* juga mempengaruhi biaya utang. *Good Corporate Governance* adalah sebuah peran penting dalam mengurangi biaya pembiayaan hutang. *Forum for Corporate Governance In Indonesia (FCGI)* (2011) mendefinisikan *corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola saham, kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan. *Corporate governance* merupakan mekanisme yang digunakan untuk mengurangi *agency problem* dengan meningkatkan pemantauan terhadap tindakan manajemen, membatasi perilaku *oportunisme* manajer, dan mengurangi risiko informasi yang ditanggung oleh pemegang saham. Beberapa penelitian sebelumnya membuktikan bahwa perusahaan dengan *corporate governance* yang lebih baik memiliki biaya ekuitas yang lebih rendah. *Corporate governance* dapat diukur dengan beberapa variabel yaitu proporsi komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komite audit (Rahmawati, 2015).

Variabel kesatu yaitu komisaris independen. Proporsi komisaris independen adalah perbandingan antara jumlah komisaris dari luar perusahaan atau bukan dari pihak yang terafiliasi dengan jumlah dewan

komisaris perusahaan (Prasojo, 2011). Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang *good governance*. Rahmawati (2015) menjelaskan apabila proporsi komisaris independen tinggi, maka kinerja perusahaan juga semakin baik. Hal ini akan menambah profit perusahaan yang dapat mengurangi biaya utang..

Variabel ke dua adalah kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial bisa diartikan persentase dari saham yang dimiliki oleh direktur dan komisaris. Dengan adanya kepemilikan ini bisa mengurangi adanya konflik keagenan disebabkan manajemen memiliki bagian dari perusahaan maka membuat semakin tinggi perusahaan untuk melakukan kegiatan aktivitas serta mengurangi atas terjadinya kecurangan yang ada di perusahaan (Swissia dan Purba, 2018). Oleh karena itu untuk meningkatkan kinerja perusahaan, manajemen akan berusaha mewujudkannya agar perusahaan mendapatkan kreditur yang lebih kecil, sehingga kreditur hanya meminta pengembalian yang kecil.

Variabel ketiga kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional yaitu kepemilikan saham pada perusahaan mempunyai bentuk sebuah

institusi yang ada di lembaga keuangan non bank misalnya seperti perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dan lain lain (Harianto, 2020). Investor institusional yang mempunyai kepemilikan saham yang besar membuat mereka akan memiliki sebuah dorongan yang kuat sebagai pengawasan dalam tindakan manajemen, mengumpulkan informasi serta mendorong agar kinerja menjadi lebih bagus serta bisa sebagai alat pengawas perusahaan. Semakin meningkatnya kepemilikan institusional di perusahaan bisa mempunyai indikasi pada kemampuan supaya bisa mengawasi pihak manajemen (Harianto, 2020). Wibowo & Nugrahanti (2013) mengatakan bahwa kepemilikan institusional yang tinggi akan meningkatkan pengelolaan dan kinerja perusahaan serta menjamin kenyamanan pemegang saham untuk mengurangi risiko perusahaan. Dengan mengurangi risiko perusahaan, biaya utang yang diberikan oleh kreditur dapat berkura (Nugroho, 2014:36).

Variabel empat adalah komite audit. Eryah, (2017:13) menjelaskan bahwa komite audit yang baik menciptakan keadaan internal perusahaan yang efektif meningkatkan kinerjanya dan meningkatkan citra perusahaan. Menjadikan kreditor lebih percaya sehingga menurunkan *cost of debt*. Gunawan (2016:6) menjelaskan bahwa semakin besar jumlah komite audit maka semakin besar kinerja pengawasan auditor dan kinerja manajemen sehingga pelaporan keuangan meningkat.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu yang dijelaskan di atas, maka peneliti mengambil judul "**PENGARUH PENGHINDARAN**

PAJAK DAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP BIAYA UTANG (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2016-2020”

1.2 Ruang Lingkup

Agar masalah dalam objek yang diteliti dapat terwujud, maka pembahasan sangat penting untuk penyusunan skripsi, untuk itu ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penghindaran pajak dan *good corporate governance* terdiri dari variabel proporsi komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komite audit.
2. Biaya utang sebagai variabel dependen
3. Obyek dalam penelitian ini yaitu pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian sebelumnya dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Utang perbankan milik pemerintah atau bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ternyata diketahui sangat besar. Utang yang menggunung hingga triliunan itu akan mengancam krisis ekonomi.

Total utang perbankan BUMN itu ikut serta total utang BUMN yang mencapai Rp 5.271 triliun (www.dpr.go.id, 17 Juli 2022).

2. Data per 31 Desember 2018, BRI merilis laporan keuangannya yang menyatakan jumlah utang sebesar Rp 1.111 triliun dengan total simpanan nasabah Rp 944 triliun. Sementara itu, total aset mencapai Rp 1,296 triliun dan ekuitas sebesar Rp 185 triliun. Demikian diungkapkan Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan dalam rilisnya, Jumat (22/11/2019) (www.dpr.go.id, 17 Juli 2022).
3. Bank Mandiri juga merilis laporan keuangan per 31 Desember 2018 dengan jumlah utang Rp 941 triliun. Total simpanan nasabah Rp 766 triliun, total aset Rp 1.202 triliun, dan ekuitas sebesar Rp 184 triliun. Lain lagi dengan BNI yang per 31 Desember 2018 menyatakan utangnya Rp 671 triliun dan total simpanan nasabah Rp 552 triliun. Sementara asetnya mencapai Rp 808 triliun dengan ekuitas sebesar Rp 110 triliun (www.dpr.go.id, 17 Juli 2022).
4. PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) menyatakan kesiapannya membayar utang obligasi sebesar Rp 1,1 triliun, yang jatuh tempo pada 30 September 2021 ini. Hal tersebut berdasarkan informasinya kepada PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (21/09/2021). Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2016 seri A, dengan nilai pokok obligasi sebesar Rp 1,1 triliun. Tenor bond ini adalah lima tahun (m.liputan6.com, 17 Juli 2022).

5. PT Bank OCBC NISP telah menyiapkan dana untuk membayar surat utang yang akan jatuh tempo pada Selasa (6/7). Berdasarkan peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) Nomor 1.A.3 tentang Kewajiban Pelaporan Emiten, PT OCBC NISP menyiapkan dana untuk pelunasan berkelanjutan III Bank OCBC NISP Tahap 1 Tahun 2018 Seri C sebesar Rp342 miliar yang jatuh tempo 6 Juli 2021. Surat Utang ini telah diterbitkan Bank OCBC NISP sejak 6 Juli 2018. Berdasarkan data Pefindo, surat utang ini memiliki bunga 7,75% bertenor 3 tahun (vibiznews.com., 30 Juli 2021).

Dari identifikasi masalah di atas, maka dapat disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah penghindaran pajak berpengaruh terhadap biaya utang pada perusahaan Sektor Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020?
2. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap biaya utang pada perusahaan Sektor Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020?
3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap biaya utang pada perusahaan Sektor Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020?
4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap biaya utang pada perusahaan Sektor Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020?

5. Apakah komite audit berpengaruh terhadap biaya utang pada perusahaan Sektor Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020?
6. Apakah penghindaran pajak, proporsi komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan komite audit berpengaruh terhadap biaya utang pada perusahaan Sektor Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020 secara simultan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya utang pada perusahaan Sektor Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
2. Menguji pengaruh proporsi komisaris independen terhadap biaya utang pada perusahaan Sektor Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
3. Menguji pengaruh kepemilikan manajerial terhadap biaya utang pada perusahaan Sektor Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
4. Menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap biaya utang pada perusahaan Sektor Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.

5. Menguji pengaruh komite audit terhadap biaya utang pada perusahaan Sektor Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
6. Menguji pengaruh penghindaran pajak, proporsi komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan komite audit terhadap biaya utang pada perusahaan Sektor Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020 secara simultan.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis (bagi akademisi)
 - a. Dalam penelitian ini dapat dijadikan sumber bahan informasi penelitian dalam pengembangan penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan referensi tambahan yang berkaitan dengan objek bahasan maupun variabel yang digunakan.
 - b. Dalam penelitian ini bisa meningkatkan ilmu dalam bidang akuntansi khususnya dalam penghindaran pajak, *good corporate governance* dan biaya utang (*cost of debt*).
2. Manfaat praktis (bagi perusahaan)
 - a. Memberikan gambaran dampak dalam melakukan penghindaran pajak dan *good corporate governance* pada perusahaan sektor perbankan di Indonesia

- b. Memberikan ilmu pengetahuan bagi setiap perusahaan sektor perbankan di Indonesia tentang pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan sehat serta dapat dijadikan sebagai panduan dalam melakukan pengendalian manajemen maupun penghindaran pajak.

